

## PERAN AUDITOR SPESIALISASI INDUSTRI DALAM MENURUNKAN PRAKTIK MANAJEMEN LABA

Ahmad Syifaudin, SE., M.Si

*Dosen Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon*

*e-mail : ahmad.syifaudin@gmail.com*

### ABSTRACT

*This study investigates the role of auditor industry specialization (measured by client sales ratio) in mitigating earnings management (measured by discretionary accruals) both before and after regulation no. 17PMK.01/2008 concerning public accountant service issued by Ministry of Financial in Indonesia. The sample is drawn from manufacturing companies which listed in BEI for periods 2006-2009 with a high leverage and size characteristic. This study find evidence that auditor industry specialization have a role in mitigating accrual earnings management better than non industry specialization and auditor industry specialization also have a role in mitigating accrual earnings management at companies with a high leverage and size both before and after this regulation issued..*

**Keyword:** *auditor industry specialization, accrual earnings management, regulation no. 17/PMK.01.2008 concerning public accountant service.*

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor pengukur kualitas auditor adalah dengan melakukan spesialisasi pada suatu industri. Hal ini dikarenakan auditor yang melakukan spesialisasi pada suatu industri, yang selanjutnya disebut dengan auditor spesialisasi industri, memiliki *database* mengenai praktik-praktik yang efektif secara mendetil, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, risiko-risiko yang ditanggung atau mungkin saja dapat ditanggung oleh perusahaan serta transaksi-transaksi yang tidak umum terjadi pada suatu industri sehingga memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap karakteristik dan tren industri yang tentu saja akan meningkatkan keefektifan proses audit secara keseluruhan.

Pemerintah pun tidak tinggal diam dan berupaya untuk menurunkan praktik-praktik manajemen laba dengan menerbitkan peraturan-peraturan baru untuk

melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Salah satu peraturan yang diterbitkan pemerintah untuk menurunkan manajemen laba adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik.

Variabel selanjutnya yang dapat mempengaruhi manajemen laba adalah rasio utang perusahaan. Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa hipotesis perjanjian utang memprediksi semakin tinggi rasio *debt-to-equity* (LEV) perusahaan maka manajer lebih berkemungkinan untuk menggunakan manajemen laba sehingga dapat meningkatkan laba yang dilaporkan saat ini. Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa manajer perusahaan dengan rasio *debt-to-equity* (LEV) yang tinggi melakukan manajemen laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang.

Variabel lain yang mempengaruhi manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Ramanna dan Roychowdhury (2009) menyatakan bahwa temuannya konsisten dengan pernyataan hipotesis biaya politik yaitu perusahaan menggunakan manajemen laba untuk mengurangi biaya politik langsung dan biaya-biaya yang terkait lainnya yang dapat menimbulkan hal-hal yang kurang menguntungkan bagi kandidat politik yang berafiliasi dengannya. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa manajer dari perusahaan besar melakukan manajemen laba untuk menghindari hal-hal yang kurang menguntungkan bagi kandidat politik yang berafiliasi dengannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yang akan diuji pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan jasa auditor spesialisasi industri dan auditor non spesialisasi industri berperan terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen?
2. Apakah penggunaan jasa auditor spesialisasi industri dan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa

Akuntan Publik berperan terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen?

3. Apakah penggunaan jasa auditor spesialisasi industri pada perusahaan dengan karakteristik rasio utang dan ukuran perusahaan yang tinggi berperan terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen?
4. Apakah penggunaan jasa auditor spesialisasi industri pada perusahaan dengan karakteristik rasio utang dan ukuran perusahaan yang tinggi dan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik berperan terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai adanya peranan auditor spesialisasi industri dalam menurunkan praktik manajemen laba.
2. Menguji peranan auditor spesialisasi industri dan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik dalam menurunkan manajemen laba.
3. Menguji apakah auditor spesialisasi industri berperan dalam menurunkan praktik manajemen laba terutama pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik rasio utang, ukuran perusahaan, nilai pasar, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen yang tinggi pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik.
4. Menguji peranan auditor spesialisasi industri dalam menurunkan praktik manajemen laba pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik rasio utang, ukuran perusahaan, nilai pasar, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen yang tinggi pada periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik.

## 2.1 Landasan Teori

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori keagenan berdasarkan penelitian Jensen dan Meckling (1976) dan teori akuntansi positif berdasarkan penelitian Watts dan Zimmerman (1986).

### 2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara beberapa orang prinsipal, yang memperkerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa sesuai dengan kepentingan prinsipal yang termasuk mendelegasikan beberapa kewenangan untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Jika hubungan kedua pihak berdasarkan pada proses memaksimalkan utilitasnya masing-masing maka terdapat dugaan untuk mengasumsikan bahwa agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik dari prinsipal karena manajemen juga ingin memaksimalkan utilitasnya. Mengingat manajemen memiliki keleluasaan untuk memilih suatu kebijakan akuntansi dari prinsip akuntansi yang berlaku umum maka wajar saja jika kemudian muncul pemikiran bahwa manajemen memilih metode akuntansi yang secara khusus akan membantu manajemen dalam mencapai tujuannya (Kusumawardhani dan Siregar, 2009). Manajemen laba dapat menimbulkan masalah-masalah keagenan yang dipicu oleh adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara prinsipal dan agen. Prinsipal dapat membatasi perbedaan pendapat antara kepentingannya dengan kepentingan manajemen dengan cara mengembangkan insentif yang sesuai bagi agen dan memunculkan biaya *monitoring* (biaya yang dimunculkan oleh prinsipal untuk mengamati, mengendalikan, mengukur tindakan dan usaha agen) yang didesain untuk membatasi perilaku agen yang menyimpang.

Sebagai tambahan pada beberapa kondisi, biaya *monitoring* akan membuat agen mengeluarkan sumber daya tertentu terkait biaya *bonding* (biaya yang dimunculkan oleh agen untuk meyakinkan bahwa agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik dari prinsipal / berperilaku efisien) sebagai jaminan bahwa agen tidak akan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang akan

mencederai kepentingan prinsipal atau untuk meyakinkan prinsipal akan memperoleh kompensasi jika agen melakukan tindakan semacam itu. Tetapi, umumnya tidak mungkin bagi prinsipal atau agen pada biaya sama dengan nol untuk meyakinkan bahwa agen akan membuat keputusan optimal dari sudut pandang prinsipal.

### **2.1.2 Teori Akuntansi Positif**

Teori akuntansi positif (Watts dan Zimmermann, 1986) menyatakan bahwa perubahan lingkungan menghendaki manajer untuk memiliki kefleksibelan dalam memilih kebijakan akuntansi agar pihak manajemen dapat menunjukkan laporan kinerjanya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada. Tetapi, kefleksibelan dalam memilih kebijakan akuntansi justru menimbulkan permasalahan perilaku oportunistik yang dapat dilakukan manajemen sehingga tidak berperilaku efisien atau untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Perilaku semacam ini muncul ketika tindakan manajemen adalah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kepentingan pribadinya. Sehingga, pola optimal dari kebijakan akuntansi dijelaskan sebagai kompromisasi antara kebijakan akuntansi untuk meminimalisir biaya kontrak dan penyediaan kefleksibelan terhadap kemungkinan perubahan akuntansi (mempertimbangkan dampak dari perilaku oportunistik).

## **2.2 Pengembangan Hipotesis**

**2.2.1 Peraturan:** Krishnan (2003) menyatakan bahwa auditor spesialisasi industri menurunkan manajemen laba berbasis akrual secara lebih baik dibandingkan dengan auditor non spesialisasi industri.

Terkait dengan pelaksanaan proses audit, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan-peraturan yang dianggap dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas audit yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik untuk menjamin kepentingan para pemegang saham. Peraturan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik yang menghendaki baik auditor maupun KAP harus selalu meningkatkan kualitas audit mereka. Simpulan dari kedua pernyataan di atas adalah auditor

spesialisasi industri lebih mampu untuk menurunkan tingkat akrual diskresioner terutama setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Berdasarkan argumen di atas, maka pengembangan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

Dengan demikian hipotesis yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

**H1a:** *Akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri lebih rendah dibandingkan dengan akrual diskresioner dari klien auditor non spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.*

**H1b:** *Akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 lebih rendah dibandingkan dengan akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.*

**2.2.2 Leverage:** Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa hipotesis perjanjian utang memprediksi semakin tinggi rasio *debt-to-equity* (LEV) perusahaan maka manajer lebih berkemungkinan untuk menggunakan manajemen laba sehingga dapat meningkatkan laba yang dilaporkan saat ini. Semakin tinggi rasio *debt-to-equity* maka perusahaan semakin mendekati kemungkinan melanggar perjanjian utang. Herawati (2008) menyatakan perusahaan yang melanggar perjanjian utang melakukan praktik manajemen laba dengan menaikkan laba yang dilaporkan pada periode sebelum terjadi pelanggaran. Hal ini dikarenakan semakin ketat batasan perjanjian utang maka semakin besar kemungkinan pelanggaran terhadapnya dan biaya yang muncul dari kelalaian secara teknis pun semakin besar. Sehingga manajer akan menggunakan fleksibilitasnya dalam memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba untuk menghindari pelanggaran terhadap perjanjian utang dan mengurangi biaya yang muncul dari kelalaian teknis.

Probabilitas dari munculnya praktik manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner pada perusahaan dengan rasio utang yang tinggi untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang dapat diturunkan dengan adanya fungsi auditor spesialisasi industri dan sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan auditor spesialisasi industri memiliki kemampuan untuk menurunkan berbagai hal antara lain, menurunkan tingkat akrual diskresioner. Kemudian dengan adanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik terdapat dugaan bahwa setelah penerbitan peraturan tersebut maka auditor spesialisasi industri akan semakin baik dalam menurunkan manajemen laba perusahaan yang diprosikan dengan akrual diskresioner. Berdasarkan argumen diatas, maka pengembangan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

Dengan demikian hipotesis yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

**H2a:** *Akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi lebih rendah dibandingkan dengan akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.*

**H2b:** *Akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 lebih rendah dibandingkan dengan akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.*

**2.2.3 Political Cost:** Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil lebih berkemungkinan untuk menggunakan akrual diskresioner dalam menurunkan laba yang dilaporkan saat ini. Ukuran perusahaan adalah proksi bagi perhatian politik (*political attention*). Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya yang lebih baik seperti struktur pendanaan, tenaga ahli keuangan, auditor internal dan eksternal yang berkualitas, dll yang dapat digunakan untuk mengelola laba.

Untuk mengukur ukuran perusahaan (SIZE), beberapa literatur mengenai auditor spesialisasi industri dan manajemen laba seperti Chen dan Elder (2001), Carcello dan Nagy (2002), Krishnan (2003), Balsam *et al.* (2003) dan Mayhew dan Wilkins (2003) menggunakan Ln(TA) yang merupakan logaritma natural dari nilai buku dari total aset perusahaan pada akhir periode. Konsisten dengan penelitian tersebut maka pada penelitian kali ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan Ln(TA).

Asumsi yang mendasari hipotesis ini adalah sangat mahal bagi investor individual untuk diinformasikan mengenai apakah laba akuntansi benar-benar mewakili laba monopoli dan untuk melakukan kontrak dengan pihak lainnya pada proses politik untuk membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang meningkatkan kesejahteraannya. Ramanna dan Roychowdhury (2009) meneliti pilihan akrual perusahaan yang melakukan kegiatan *outsource* berkaitan dengan pemilihan kandidat kongres di AS pada tahun 2004, menyatakan bahwa temuannya konsisten dengan pernyataan hipotesis biaya politik yaitu perusahaan menggunakan manajemen laba untuk mengurangi biaya politik langsung dan biaya-biaya yang terkait lainnya yang dapat menimbulkan hal-hal yang kurang menguntungkan bagi kandidat politik yang berafiliasi dengannya.

Probabilitas pelaksanaan manajemen laba pada perusahaan besar melalui akrual diskresioner dapat diturunkan dengan adanya auditor spesialisasi industri karena salah satu fungsinya adalah untuk menurunkan manajemen laba. Kemudian dengan adanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik terdapat dugaan bahwa setelah penerbitan peraturan tersebut maka peranan auditor spesialisasi industri akan semakin meningkat dalam menurunkan manajemen laba perusahaan yang diprosikan dengan akrual diskresioner. Berdasarkan argumen diatas, maka pengembangan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:



Dengan demikian hipotesis yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

**H3a:** *Akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar lebih rendah dibandingkan dengan klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.*

Dengan demikian hipotesis yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

**H3b:** *Akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 lebih rendah dibandingkan dengan akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.*

### **3.1 Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2009. Metoda pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dengan metoda tersebut, sampel dipilih berdasarkan kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan oleh peneliti.

Sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur.
2. Perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan yang berakhir pada 31 desember periode 2006-2009.
3. Perusahaan tersebut memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **3.2 Sumber Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Metoda pengumpulan data menggunakan data dokumentasi atau kutipan langsung dari berbagai sumber. Data diperoleh dari *Indonesia Stock Exchange* untuk

mengetahui semua perusahaan-perusahaan manufaktur yang telah *go public* di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan 2009.

### 3.3 Definisi Operasional

#### 3.3.1 Auditor Spesialisasi Industri

Pengukuran auditor spesialisasi industri terbagi ke dalam beberapa pengukuran dikarenakan proses pengukurannya tidak dapat dilakukan secara langsung. Beberapa hal terkait faktor-faktor spesifik industri, seperti yang akan didiskusikan dibawah ini dapat mempengaruhi insentif atau kemampuan auditor pada proses spesialisasi pada suatu industri sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengukuran auditor spesialisasi industri.

Asumsi yang mendasari penggunaan pengukuran pangsa pasar adalah jika usaha auditor untuk meningkatkan keahliannya pada suatu industri terbukti untuk meningkatkan tingkat pendapatan dalam hal kefokusannya pada suatu industri maka pangsa pasar untuk auditor spesialisasi industri akan meningkat sejalan dengan waktu (Hogan dan Jeter, 1999).

Peneliti berargumentasi bahwa pangsa pasar KAP yang lebih besar, terkait spesialisasi dalam suatu industri klien, secara potensial membedakannya dari KAP dengan pangsa pasar yang lebih kecil. Pengukuran pangsa pasar auditor spesialisasi industri pada penelitian ini menggunakan basis rasio penjualan klien.

Pangsa pasar auditor spesialisasi industri didefinisikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio penjualan perusahaan-}m = \sum [si/S]$$

si = penjualan perusahaan i, dengan perusahaan I diaudit oleh KAP j

S = penjumlahan nilai penjualan, si, untuk seluruh perusahaan dalam industri

Jika pangsa pasar auditor j lebih besar dari 10% maka auditor j dinyatakan sebagai auditor spesialisasi industri.

### 3.3.2 Manajemen Laba

Definisi manajemen laba yang lebih populer dan ekstensif telah diberikan oleh Healy dan Wahlen (1999) yaitu manajemen laba muncul saat manajer menggunakan suatu kebijakan pada proses pelaporan keuangan dan dalam penyusunan transaksi keuangan untuk mengubah laporan keuangan baik untuk “menyesatkan” beberapa stakeholder mengenai kinerja mendasar dari perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual berdasarkan jumlah akuntansi yang dilaporkan. Pendeteksian manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan komponen akrual diskresioner yang dikalkulasikan berdasarkan model KS. Thomas dan Zhang (2000) menyatakan bahwa model KS sebagai salah satu model pengukuran akrual diskresioner menunjukkan kemampuan yang lebih baik secara moderat dibandingkan kelima model lainnya (yaitu model *random walk*, *mean reverting*, komponen, Jones dan industri) yang diuji secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan model KS untuk mengukur akrual diskresioner. Persamaan model KS untuk menghitung akrual diskresioner adalah sebagai berikut:

$$\Delta D_{i,t} = \frac{TA_{i,t}}{A_{i,t-1}} - \{c_0 + c_1 \left[ \frac{ART_{i,t-1}}{REV_{i,t-1}} \right] \left( \frac{REV_t}{A_{i,t-1}} \right) + c_2 \left[ \frac{OCAL_{i,t-1}}{EXP_{i,t-1}} \right] \left( \frac{EXP_t}{A_{i,t-1}} \right) + c_3 \left[ \frac{DEPR_{i,t-1}}{GPPE_{i,t-1}} \right] \left( \frac{GPPE_t}{A_{i,t-1}} \right)\}$$

Ket:

$TA_{i,t}$  = total akrual perusahaan i pada tahun t ( $\Delta CA - \Delta CASH - \Delta CL - DEPR$ ).

$\Delta CA$  = aset lancar perusahaan i pada tahun t - aset lancar perusahaan i pada tahun t-1.

$\Delta CASH$  = kas perusahaan i pada tahun t - kas perusahaan i pada tahun t-1.

$\Delta CL$  = utang lancar perusahaan i pada tahun t - utang lancar perusahaan i pada tahun t-1.

$DEPR$  = biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan i pada tahun t.

$A_{i,t-1}$  = aset perusahaan i pada tahun t-1.

$ART_{i,t-1}$  = piutang dagang perusahaan i pada tahun t-1.

$REV_{i,t-1}$  = pendapatan perusahaan i pada tahun t-1.

$REV_t$  = pendapatan perusahaan i pada tahun t.

$OCAL_{i,t-1}$  = aset lancar-piutang dagang-kas-utang lancar perusahaan i tahun t-1.

$EXP_{i,t-1}$ = penjualan bersih-laba operasi-biaya depr perusahaan i tahun t-1.

$EXP_t$ = penjualan bersih-laba operasi-biaya depr perusahaan i pada tahun t.

$DEP_{i,t-1}$ = biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan I pada tahun t-1.

$GPPE_{i,t-1}$ = aset tetap bruto perusahaan i pada tahun t-1.

$GPPE_t$ = aset tetap bruto perusahaan i pada tahun t.

### 3.4 Metoda Analisis Data

Analisis yang dilakukan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji beda dua rata-rata sampel independen (*independent sample t-test*) dan observasi berpasangan (*paired sample t-test*).

### 3.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis 1a dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata aktual diskresioner antara klien auditor spesialisasi industri dan klien auditor non spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata aktual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata aktual diskresioner dari klien auditor non spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 1a dapat diterima.

Pengujian hipotesis 1b dilakukan dengan membagi pengujian menjadi dua tahapan. Pertama, dengan membandingkan nilai rata-rata aktual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2008-2009. Kedua, dengan membandingkan aktual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata aktual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri setelah penerbitan peraturan bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata aktual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan peraturan tersebut dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 1b dapat diterima.

Pengujian hipotesis 2a dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan dengan rasio utang yang rendah pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 2a dapat diterima.

Pengujian hipotesis 2b dilakukan dengan membagi pengujian menjadi dua tahapan. Pertama, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2008-2009. Kedua, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 2b dapat diterima.

Pengujian hipotesis 3a dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan yang merupakan perusahaan kecil pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata

akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 3a dapat diterima.

Pengujian hipotesis 3b dilakukan dengan membagi pengujian menjadi dua tahapan. Pertama, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2008-2009. Kedua, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 3b dapat diterima.

#### **4.2 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif pada tabel 4.1 dan 4.2 menunjukkan nilai rata-rata, deviasi standar, maksimum dan minimum dari variabel-variabel penelitian ini dengan pengklasifikasian sebagai klien dari auditor spesialisasi industri dan klien dari auditor non spesialisasi industri. Nilai rata-rata dan deviasi standar digunakan untuk menentukan fluktuasi satuan variabel-variabel yang diuji. Data maksimum dan minimum melibatkan kisaran data yang normal untuk menghindari biasnya hasil penelitian.

Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2 dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nilai akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik.

**Tabel 4.1 Deskripsi Statistik  
Akrual Diskresioner  
Klien Auditor Spesialisasi Industri**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AD KSI Sebelum	98	-8.04	1.03	-.0010	1.40062
AD KSI Setelah	98	-11.06	1.11	-.0072	.81962
Valid N (listwise)	98				

**Tabel 4.1 Deskripsi Statistik  
Akrual Diskresioner  
Klien Auditor Non Spesialisasi Industri**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AD KNSI Sebelum	56	-1.12	.77	-.0003	.39895
AD KNSI Setelah	56	-7.04	8.79	-.0096	1.99396
Valid N (listwise)	56				

### 4.3 Hasil Pengujian

Hipotesis 1a diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t sampel independen untuk membandingkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dan dari klien auditor non spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Pengujian hipotesis 1a terangkum pada tabel 4.9 menunjukkan nilai rata-rata akrual diskresioner sebesar (0,01968) untuk klien auditor spesialisasi industri dan sebesar 0,02859 untuk klien auditor non spesialisasi industri. Berdasarkan nilai rata-rata akrual diskresioner terlihat bahwa klien auditor spesialisasi industri memiliki nilai rata-rata akrual diskresioner lebih rendah dibandingkan dengan klien auditor non spesialisasi industri. Nilai uji beda pada variansi diasumsikan sama adalah 2,095 dengan nilai p sebesar 0,038. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri berbeda secara statistis dengan klien auditor non spesialisasi industri yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri lebih rendah dibandingkan dengan akrual diskresioner klien auditor non spesialisasi

industri. Oleh karena itu hipotesis 1a didukung secara statistis pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

**Tabel 4.3**  
**Pengujian Hipotesis 1a (H1a)**

AD KSI	AD KNSI	Prob	Hasil
(0,01968)	0,02859	0,038	Didukung

Hipotesis 1b diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan untuk membedakan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri pada periode sebelum dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan pada tabel 4.10 menunjukkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2006-2007 sebesar 0,20016 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2008-2009 sebesar (0,03814). Nilai uji beda antara rata-rata akrual diskresioner pada periode setelah dan sebelum penerbitan adalah 2,131 dengan nilai probabilitas sebesar 0,036. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien dari auditor spesialisasi industri berbeda secara statistis yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Oleh karena itu hipotesis 1b didukung secara statistis pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

**Tabel 4.4**  
**Pengujian Hipotesis 1b (H1b)**

Ket	Sebelum	Setelah	Prob	Hasil
AD KSI	0,20016	(0,03814)	0,036	Didukung

Hipotesis 2a diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t sampel independen untuk membandingkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor



spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan rendah pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik yaitu tahun 2006-2007. Pengujian hipotesis 2a terangkum pada tabel 4.11 menunjukkan nilai rata-rata akrual diskresioner sebesar (1,95176) untuk klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan sebesar 0,86841 untuk klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah. Berdasarkan nilai rata-rata akrual diskresioner terlihat bahwa klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi memiliki nilai rata-rata akrual diskresioner lebih rendah dibandingkan dengan klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah. Nilai uji beda pada variansi diasumsikan sama adalah 2,954 dengan nilai p sebesar 0,004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi berbeda secara statistis dengan klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah. Oleh karena itu hipotesis 2a didukung secara statistis pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

**Tabel 4.5**  
**Pengujian Hipotesis 2a (H2a)**

Ket	Utang Tinggi	Utang Rendah	Prob	Hasil
AD KSI	(1.95716)	0,86841	0,004	Didukung

Hipotesis 2b diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan untuk membedakan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi pada periode sebelum dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan pada tabel 4.12 menunjukkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi pada periode sebelum penerbitan tersebut yaitu tahun 2006-2007 sebesar 1,4830 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi pada periode setelah penerbitan peraturan

tersebut yaitu tahun 2008-2009 sebesar (0,0721). Nilai uji beda antara rata-rata akrual diskresioner pada periode setelah dan sebelum penerbitan adalah 2,307 dengan nilai probabilitas sebesar 0,023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien dari auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi berbeda secara statistis yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi pada periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Oleh karena itu hipotesis 2b didukung secara statistis pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

**Tabel 4.6**  
**Pengujian Hipotesis 2b (H2b)**

Ket	Utang	Sebelum	Setelah	Prob	Hasil
AD KSI	Tinggi	1.4830	(0,0721)	0,023	Didukung

Hipotesis 3a diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t sampel independen untuk membandingkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik yaitu tahun 2006-2007. Pengujian hipotesis 3a terangkum pada tabel 4.13 menunjukkan nilai rata-rata akrual diskresioner sebesar (1,66954) untuk klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan sebesar 1,60593 klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil. Berdasarkan nilai rata-rata akrual diskresioner terlihat bahwa klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar memiliki nilai rata-rata akrual diskresioner lebih rendah dibandingkan dengan klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil. Nilai uji beda pada variansi diasumsikan sama adalah 3,013 dengan nilai p sebesar 0,003. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri yang

merupakan perusahaan besar berbeda secara statistis dengan klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil. Oleh karena itu hipotesis 3a didukung secara statistis pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

**Tabel 4.7**  
**Pengujian Hipotesis 3a (H3a)**

Ket	Perusahaan Besar	Perusahaan Kecil	Prob	Hasil
AD KSI	(1,66954)	1,60593	0,003	Didukung

Hipotesis 3b diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan untuk membedakan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besarpada periode sebelum dan setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan pada tabel 4.14 menunjukkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2006-2007 sebesar 1,6469 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar pada periode setelah penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2008-2009 sebesar (0,0313). Nilai uji beda antara rata-rata akrual diskresioner pada periode setelah dan sebelum penerbitan adalah 2,520 dengan nilai probabilitas sebesar 0,013. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar berbeda secara statistis yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar pada periode setelah Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor

17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Oleh karena itu hipotesis 3b didukung secara statistis pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

**Tabel 4.8**  
**Pengujian Hipotesis 3b (H3b)**

Ket	Perusahaan	Sebelum	Setelah	Prob	Hasil
AD KSI	Besar	1,6469	(0,0313)	0,013	Didukung

#### 4.4 Pembahasan Hasil

Hasil pengujian hipotesis 1a (H1a) menunjukkan bahwa akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri lebih rendah dibandingkan dengan akrual diskresioner dari klien auditor non spesialisasi industri. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Krishnan (2003) yang menyatakan bahwa auditor spesialisasi industri menurunkan manajemen laba berbasis akrual secara lebih baik dibandingkan dengan auditor non spesialisasi industri. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan jasa auditor spesialisasi industri dapat digunakan sebagai alat ukur bagi pemangku kepentingan dalam memutuskan untuk berinvestasi atukah tidak pada suatu perusahaan.

Hasil pengujian pada hipotesis 1b (H1b) menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Januarsi (2009) yang menyatakan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 (sebelum memperoleh perubahan sehingga menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa terdapat peningkatan kinerja auditor

spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner seiring dengan berjalannya waktu setelah penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 hingga penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik.

Pengujian hipotesis 2a (H2a) menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah. Penelitian Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio *debt-to-equity* (LEV) perusahaan maka manajer lebih berkemungkinan untuk menggunakan manajemen laba untuk meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tertentu. Sehingga memberikan insentif bagi pihak manajemen dengan karakteristik perusahaan dengan rasio utang yang tinggi untuk melakukan manajemen laba. Sedangkan penelitian Balsam *et al.* (2003) mengindikasikan terdapat korelasi kecil yang signifikan antara lima dari enam pengukuran yang digunakan pada penelitiannya untuk auditor spesialisasi industri terhadap akrual diskresioner absolut klien. Penelitian Balsam *et al.* (2003) memberikan bukti bahwa akrual diskresioner, sebagai proksi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen, dapat diturunkan dengan penugasan auditor spesialisasi industri. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan jasa auditor spesialisasi industri pada perusahaan dengan karakteristik utang yang tinggi berperan dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga pemangku kepentingan sebaiknya bersedia untuk membayar lebih tinggi untuk memperoleh jasa atestasi yang lebih baik.

Pengujian hipotesis 2b (H2b) menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan karakteristik rasio utang yang tinggi pada periode setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri dengan karakteristik rasio utang yang tinggi pada periode sebelum penerbitan Peraturan

Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian Watts dan Zimmermann (1986) yang menunjukkan adanya insentif bagi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba terutama perusahaan dengan karakteristik memiliki rasio utang yang tinggi. Sedangkan penelitian Balsam *et al.* (2003) memberikan bukti bahwa akrual diskresioner, sebagai proksi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen, dapat diturunkan dengan penugasan auditor spesialisasi industri tetapi hasil pengujian ini tidak sesuai dengan penelitian Januarsi (2009) yang menemukan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 (sebelum memperoleh perubahan sehingga menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa peranan auditor spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner pada klien dengan karakteristik rasio utang yang tinggi meningkat setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Sehingga pemangku kepentingan dapat memperoleh jasa atestasi yang lebih baik dibandingkan sebelum penerbitan peraturan tersebut.

Pengujian Hipotesis 3a (H3a) menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil. Penelitian Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil lebih berkemungkinan untuk menggunakan akrual diskresioner dalam menurunkan laba yang dilaporkan saat ini. Penelitian Watts dan Zimmerman (1986) memberikan bukti bahwa terdapat insentif bagi pihak manajemen dengan karakteristik berukuran besar untuk melakukan manajemen laba. Sedangkan penelitian Balsam *et al.* (2003)

mengindikasikan terdapat korelasi kecil yang signifikan antara lima dari enam pengukuran yang digunakan pada penelitiannya untuk auditor spesialisasi industri terhadap akrual diskresioner absolut klien. Penelitian Balsam *et al.* (2003) menunjukkan bukti bahwa auditor spesialisasi industri berperan dalam menurunkan manajemen laba terutama dengan menggunakan akrual diskresioner. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan jasa auditor spesialisasi industri pada perusahaan dengan karakteristik berukuran besar berperan dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga pemangku kepentingan sebaiknya bersedia untuk membayar lebih tinggi untuk memperoleh jasa atestasi yang lebih baik.

Pengujian Hipotesis 3b (H3b) menunjukkan bahwa rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar pada periode setelah Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian Watts dan Zimmerman (1986) yang memberikan bukti bahwa terdapat insentif bagi pihak manajemen dengan karakteristik berukuran besar untuk melakukan manajemen laba. Penelitian Balsam *et al.* (2003) menunjukkan bukti bahwa auditor spesialisasi industri berperan dalam menurunkan manajemen laba terutama dengan menggunakan akrual diskresioner tetapi hasil pengujian ini tidak sesuai dengan penelitian Januarsi (2009) yang menyatakan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 (sebelum memperoleh perubahan sehingga menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa peranan auditor spesialisasi industri pada

perusahaan dengan karakteristik berukuran besar dalam menurunkan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner meningkat setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Sehingga pemangku kepentingan dapat memperoleh jasa attestasi yang lebih baik dibandingkan sebelum penerbitan peraturan tersebut.

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dijabarkan sebelumnya maka secara umum dapat disimpulkan bahwa

1. Auditor spesialisasi industri lebih berperan dalam menurunkan manajemen laba melalui akrual diskresioner dibandingkan dengan auditor non spesialisasi industri. Hal ini dapat menunjukkan bukti bahwa kinerja auditor yang melakukan spesialisasi lebih baik dibandingkan auditor yang tidak melaksanakannya. Bahkan, setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik, kinerja auditor spesialisasi industri pun semakin meningkat. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti berpendapat bahwa penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik memiliki kontribusi yang signifikan bagi kinerja dari auditor spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba melalui akrual diskresioner.
2. Auditor spesialisasi industri lebih berperan dalam menurunkan manajemen laba melalui akrual diskresioner pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik rasio utang dan ukuran perusahaan yang tinggi.
3. Peningkatan peranan auditor spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba melalui akrual diskresioner pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik rasio utang, ukuran perusahaan dan nilai pasar yang tinggi pada periode setelah penerbitan peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.01/2008.

### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pengukuran auditor spesialisasi industri pada penelitian ini menggunakan pendekatan pangsa pasar KAP yaitu



dengan menggunakan data penjualan klien sesuai dengan penelitian Zhou dan Elder (2001) yang sebaiknya menggunakan dasar data penghasilan KAP.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adeyemi, S. B., dan T. O. Fagbemi. 2010. Audit Quality, Corporate Governance dan Firm Characteristics in Nigeria. *International Journal of Business and Management Vol. 5, No. 5*.
- Balsam, S., J. Khrisnan dan J. S. Yang. 2003. Auditor Industry Specialization dan Earnings Quality. *Auditing: A Journal Of Practice & Theory* 22: pg.71.
- Bartov, E., F. A. Gul, dan J. S. L. Matsui. 2000. Discretionary-Accruals Models and Audit Qualifications. *Working Papers*, Penn State, the University of Rochester.
- Bauwhede, H. V., dan M. Willekens. 2003. Earnings Management in Belgium: A Review Of The Empirical Evidence. *Tidjschrift voor Economie en Management* Vol. XLVIII, 2, 2003.
- Beasley, M. S., dan Petroni, K. R. 2001. Board independence dan audit-firm type. *Auditing* 20: 97-114.
- Behn, B. K.; J. V. Carcello; D. R. Hermanson; dan R. H. Hermanson. 1997. Satisfaction among Clients of Big 6 Firms. *Accounting Horizons* 11: 7-24
- Carcello, J.V., dan A. L. Nagy. 2002. Auditor industry specialization dan fraudulent financial reporting. Working Paper.
- Cohen, Daniel A. dan Paul Zarowin\*. 2008. Accrual-Based dan Real Earnings Management Activities around Seasoned Equity Offerings. *Newyork University*.
- Chen, K. Y., dan R. J. Elder. 2001. Industry Specialization and Audit Fees: The Effect of Industry Type and Market Definition. *Working Paper, National Cheng Kung University dan Syracuse University*.
- Daniri, M. A. dan Angela I. Simatupang. 2008. Rekeyasa Laporan Keuangan: Isu Akuntansi Atau Governance? *Bisnis Indonesia*, Edisi 20 April 2008.
- DeAngelo, E. 1981. Auditor Independence, Low Balling and Disclosure Regulation. *Journal of Accounting and Economics* 20: 297-322.
- Dechow, M. P.; Sloan. G.R.; dan Sweeney. P. A. 1995. Detecting Earnings Management. *Accounting Review* Vol. 70, No. 2 April 1995, pp. 193-225.
- Healy, P., dan J.M. Wahlen, 1999. A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Stdanard Setting. *Accounting Horizons* 13: 365-383.
- Vinola Herawaty. 2008. Peran Praktek *Corporate Governance* sebagai *Moderating Variable* dari Pengaruh *Earnings Management* terhadap Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak*.
- Hogan, C. E., dan D. C. Jeter. 1999. Industry Specialization by Auditors. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 18: 1-17.

- Januarsi, Y. 2009. Peran Auditor Spesialis Industri dalam Mengurangi Manajemen Laba Akruwal dan Manajemen Laba Real Pada Periode Sebelum dan Setelah Keputusan Menteri Keuangan no.423/KMK.06/2002. *Symposium Nasional Akuntansi XII, Palembang*.
- Jensen, M.C., dan W.H. Meckling. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs dan ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3:305–360.
- Jones, J. 1991. Earnings Management During Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research* Vol 29: 193-228.
- Kusumawardhani, N. A. S., dan S. V. Siregar. 2009. Fenomena Manajemen Laba Menjelang Ipo dan Kaitannya dengan Nilai Perusahaan Perdana serta Kinerja Perusahaan Pasca-IPO: Studi Empiris Pada Perusahaan yang IPO di Indonesia Tahun 2000-2003. *Symposium Nasional Akuntansi XII, Palembang*.
- Krishnan, Gopal V. 2003. Does Big Six Auditor Industry Expertise Constrain Earnings Management? *Accounting Horizon* 17: 1.
- Maletta, M., dan A. Wright. 1996. Audit Evidence Planning: An Examination of Industry Error Characteristic. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* (Spring): 71-86.
- Nelson, M. W.; J. A. Elliott.; dan R. L. Tarpley. 2002. Evidence from Auditors about Managers` and Auditors` Earnings Management Decisions. *The Accounting Review* Vol. 77: 175-202.
- Owhoso, V. E.; W. F. Messier Jr.; dan J. G. Lynch, Jr. 2001. "Error Detection by Industry Specialized Teams During Sequential Audit Review." *Working paper, Bentley College*.
- Peasnel, K.V.; P.F. Pope.; dan S. Young. 2000. Detecting Earnings Management Using Cross-Sectional Abnormal Accruals Models\*. *Lancaster University*.
- Porter, E. M. 1985. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Newyork
- Ramanna, K., dan S. Roychowdhury. 2009. Elections dan Discretionary Accruals: Evidence from 2004. *Working Paper. Harvard Business School*.
- Roychowdhury, S. 2006. Earnings Management through Real Activities Manipulation. *Journal of Accounting and Economics* 50:63-100.
- Spohr, J. 2005. Essays on Earnings Management. *Swedish School of Economics and Business Administration*.
- Thomas, J., dan Xiao-jun Zhang. 2000. Identifying Unexpected Accruals: A Comparison of A Current Approach. *Columbia Business School*.
- Zhou, J. dan R. Elder. 2001. Audit Firm Size, Industry Specialization and Earnings Management by Initial Public Offerings Firms.